

# VOX POPULI

Volume 4 Nomor 2 Desember 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

## POLITIK DAN HUKUM

### **Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019**

*Wahyuni*  
57-68

### **Hak dan Keterwakilan Politik dalam Arena Politik Indonesia**

*M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam*  
69-79

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat**

*Lorent Tombi, Muhtar, Arifin*  
80-94

### **Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

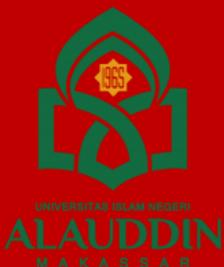
*Barik Ramadhani P.*  
95-108

### **Perempuan dan Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19**

*Astri Nugrayanti A., Anggriani Alamsyah,*  
109-118

### **Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme**

*Yusti Ramadhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith*  
119-130



Dipublikasikan Oleh  
Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

# Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

**Wahyuni**

*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*  
e-mail: sahidwahyuni@gmail.com

## **Abstrak**

*Artikel ini berbicara tentang peran dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam melaksanakan sosialisasi politik pada pemilu presiden 2019 di Kota Makassar. Ada dua pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam artikel ini, yakni; bagaimana peran KPU Kota Makassar dalam melaksanakan sosialisasi politik dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan konsep sosialisasi politik. Kesimpulan artikel ini secara umum adalah bahwa KPU Kota Makassar menggunakan metode Sosialisasi Langsung dan Tidak Langsung serta melibatkan Tim Relasi dalam melaksanakan sosialisasi politik. Sementara kendala yang ditemukan salah satunya adalah masih adanya penyelenggara yang berpihak pada calon tertentu sehingga sosialisasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya.*

## **Kata Kunci :**

*KPU, Sosialisasi Politik, Pilpres 2019*

## **PENDAHULUAN**

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Terlaksananya sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada.<sup>1</sup> Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialisasi politik melalui proses yang

berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik.<sup>2</sup>

Salah satu bukti keberhasilan sosialisasi politik adalah tingginya tingkat partisipasi

---

<sup>1</sup>A. A. Sahid Gatara & Moh Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 79.

---

<sup>2</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 168.

politik masyarakat yang ditandai keikutsertaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum sangat penting karena merupakan momen untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat. Hal yang sebaliknya terjadi bila sosialisasi politik tidak berhasil maka banyak masyarakat yang tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang biasa disebut dengan *golput*.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sangat menentukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melakukan sosialisasi politik. Salah satu tugas dan agenda KPU adalah penyebaran regulasi menyangkut pelaksanaan pemilu. Untuk itu, sebaiknya KPU di daerah juga mengajak semua elemen baik itu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat atau LSM untuk melakukan hal yang sama dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses politik yang terjadi.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peran KPU Kota Makassar dalam sosialisasi politik dan kendala apa yang dihadapi terutama dalam pemilihan presiden tahun 2019.

## TINJAUAN TEORETIS

Sosialisasi politik dalam ilmu sosiologi dipahami sebagai proses pembelajaran dan pelatihan untuk menanamkan seperangkat nilai-nilai dan norma sosial kepada seseorang atau sekelompok orang agar pihak

yang disosialisasikan menjadi kepribadian yang utuh dan sikap serta perilakunya sejalan dengan harapan kelompok.<sup>3</sup> Akan tetapi pengertian ini menjadi luas tatkala sosiologi dielaborasi dengan disiplin ilmu lain. Kenyataan ini kemudian menyebabkan berbagai konsep lahir terkait dengan sosialisasi.

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi *input* sistem politik yang berlaku di negara mana pun, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator, dan sebagainya. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Michael Rush dan Philip Althoff merupakan dua orang yang memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka "*An Introduction to Political Sociology*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pengantar Sosiologi Politik.<sup>4</sup> Rush dan Althoff menerbitkan terminasi baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu yaitu sosialisasi politik.

Menurut Rush dan Althoff bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan

<sup>3</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 167.

<sup>4</sup>Michael Rush & Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 25.

di mana individu berada. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Michael Rush dan Philip Althoff memberikan batasan sosialisasi politik sebagai proses oleh pengaruh di mana seorang individu atau kelompok individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa *input* politik, *output* politik, maupun orang-orang yang menjalankan pemerintahan.<sup>5</sup> Adapun fungsi sosialisasi politik sebagai berikut: *Pertama*, melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diajarkan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilu.

*Kedua*, memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri ataupun pemerintahan yang tengah

memerintah mereka akan menjadi warga negara tanpa identitas tentunya.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di 3 kecamatan yang ada di Kota Makassar yaitu Kecamatan Maccini Parang, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya. Selain di tiga kecamatan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan komisioner KPU Provinsi dan Kota Makassar serta anggota Tim Relawan Demokrasi (Relasi).

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan tujuan menggambarkan peran KPU dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Penggambaran dilakukan secara sistematis dari suatu fakta secara faktual dan cermat, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail dan mempertahankan keutuhan obyek pengamatan dalam arti data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif sebagai analisis utama. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang peran yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar dalam sosialisasi politik.

Data yang diperoleh dibedakan atas data primer dan data sekunder. Mencakup data-

<sup>5</sup>Michael Rush & Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 170.

<sup>6</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 171.

data tentang proses dan frekuensi perubahan serta data-data tentang makna dari adanya perubahan sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara bebas dan observasi partisipasi. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui bahan pustaka baik berupa literatur-literatur, jurnal, buletin dan dokumen-dokumen serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data melalui proses inklusi dan eksklusi. Proses inklusi yakni mengambil data yang relevan dengan penelitian sedangkan proses eksklusi adalah membuang data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang relevan dilanjutkan dengan mencari makna (*meaning*). Pemberian makna yang merupakan upaya yang lebih jauh dari penafsiran. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### *Sosialisasi Politik KPU Kota Makassar*

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seseorang individu untuk bertingkah-laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Sosialisasi adalah suatu proses di dalam hidup seseorang individu untuk mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud supaya dapat diterima oleh

masyarakat. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka macam antara lain jabatan presiden, anggota legislatif, pemilihan gubernur dan lain-lain. Sosialisasi pemilu sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena terkadang mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dan sistem pemilihan. Sosialisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, diharapkan sosialisasi politik dapat menumbuhkan kesadaran dalam menyalurkan hak politik.

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar menggunakan dua cara yaitu sosialisasi tidak langsung dan sosialisasi langsung. Sosialisasi tidak langsung merupakan metode penyampaian yang dilakukan KPU Kota Makassar dengan cara mengandalkan media elektronik, media sosial, pamflet dan brosur. Pamflet dan brosur pun disebar di tempat umum dan juga melalui media sosial. Sedangkan sosialisasi langsung dilakukan oleh KPU Kota Makassar dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan metode pemilihan tanpa menggunakan media atau perantara agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai metode pemilihan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Cara sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersebut, dijelaskan berdasarkan hasil penelitian lapangan sebagai berikut:

### *Sosialisasi Tidak Langsung*

Sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar lebih mengutamakan sosialisasi tidak langsung yaitu dengan menggunakan media sosial dalam menyampaikan informasi ke masyarakat seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan MA yang menyatakan bahwa:

*“Melihat pelaksanaan pemilihan umum yang telah lalu itu sangatlah rumit karena banyak sekali yang akan dipilih dan menggunakan banyak kertas surat suara dan membuat pemilih bingung sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Melihat sosialisasi yang dilakukan KPU di Kelurahan Manggala bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU yaitu sosialisasi tidak langsung ke masyarakat, hanya dilakukan di tempat umum seperti kampus, kantor kelurahan, itupun hanya sebagian masyarakat saja yang hadir karena hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialisasi ini lebih mengutamakan jejaring sosial khususnya masyarakat di Perumahan Bukit Graha Praja Kelurahan Manggala sehingga masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial namun sayangnya sosialisasi dalam bentuk seperti ini tidak mampu menjangkau semua elemen masyarakat khususnya masyarakat yang sudah berusia senja dan tidak mengerti menggunakan media social. Sehingga masyarakat yang berusia senja*

*ini kurang paham mengenai proses pemilihan yang akan dilakukan”.*<sup>7</sup>

Bentuk sosialisasi tidak langsung yang dilakukan KPU yaitu menggunakan media elektronik dan media *online* seperti yang diutarakan oleh salah seorang informan yang bernama MD:

*“Dari pelaksanaan pemilu yang baru-baru ini saya melihat proses sosialisasi yang dilakukan KPU mengenai pelaksanaan pemilu pada pemilihan serentak yang lalu lebih mengandalkan media elektronik seperti televisi dan media online baik sosialisasi kapan pelaksanaan, siapa saja yang akan di pilih, dan bagaimana cara memilih. Melihat sosialisasi seperti ini menurut saya kurang efektif karena masyarakat akan kurang mendapatkan informasi.”*<sup>8</sup>

Bentuk sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan media sosial dimanfaatkan oleh remaja yang merupakan pemilih pemula. Pemanfaatan aplikasi media sosial tidak hanya untuk melakukan komunikasi dengan individu lain tetapi juga dijadikan sarana sosialisasi politik, khususnya pada saat pemilihan umum. Penggunaan media sosial semakin meluas terutama dikalangan pelajar dan pemilih pemula karena memiliki jangkauan yang luas, dan dari segi biaya lebih murah ketimbang menggunakan media cetak klasik seperti

<sup>7</sup>MA, Warga Perumahan Bukit Graha Praja, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, *wawancara*, 18 Juli 2019.

<sup>8</sup>WD, Wiraswasta, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, *wawancara*, 18 Juli 2019.

spanduk, baliho, pamflet dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

*“Saat ini sosialisasi politik lebih efisien menggunakan media sosial karena dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan realitasnya masyarakat terutama kalangan pelajar yang merupakan pemilih pemula, rata-rata telah menggunakan berbagai aplikasi media sosial yang memiliki urgensi untuk melakukan pendidikan politik dalam rangka memberikan pemahaman dan sekaligus pencerdasan politik kepada masyarakat, namun demikian media seperti baliho, spanduk maupun pamflet harus tetap ada karena tidak semua orang punya media sosial.”<sup>9</sup>*

Informan penelitian memiliki pendapat yang sama tentang urgensi media sosial yang dimanfaatkan untuk pendidikan politik dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi politik serta bagaimana politisi menggunakan akun media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan visi, misi dan *platform* calon presiden, sehingga anggota masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Media sosial telah dijadikan model dikalangan para politisi untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat secara luas.

---

<sup>9</sup>JM, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar, wawancara, 18 Oktober 2019.

Media massa memiliki peran yang penting dalam mesosialisasikan pemilu dan tingkat penerimaannya tinggi terutama media internet dan media audio visual atau televisi. Media ini merupakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan sehingga selain sebagai pemberi informasi, internet juga merupakan alat komunikasi, karena anggota masyarakat banyak yang memiliki *handphone*.

Di atas menunjukkan adanya media televisi dan internet merupakan salah satu media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak yang berkenan dengan Pilpres 2019. Masyarakat dapat menyaksikan iklan Pilpres 2019 serta mendapatkan informasi serta pengetahuan. Media sosial telah menjadi tren dikalangan para politisi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula.

Hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa sosialisasi politik dilakukan oleh KPU dengan menggunakan sarana media sosial maka peneliti pun melakukan observasi terhadap beberapa media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan *youtube* untuk mendapatkan data yang lebih riil dalam mendukung hasil wawancara. Sosialisasi yang menggunakan media sosial yang dilakukan KPU Kota Makassar yaitu penyebaran brosur di *facebook* seperti memposting ketentuan surat suara bagi yang pindah memilih.

Bentuk sosialisasi tidak langsung selain melalui media sosial adalah sosialisasi

dengan bentuk spanduk. Spanduk dipasang di tempat-tempat yang strategis dan mudah terlihat. Pemasangan spanduk dalam rangka mensosialisasikan tahapan pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada tanggal 17 April 2019. KPU Kota Makassar memasang spanduk dan baliho di beberapa kantor lurah yang ada di Kota Makassar. Spanduk tersebut banyak bentuk seperti spanduk nama-nama calon presiden dan wakil presiden maupun spanduk partai politik. Spanduk berisi ajakan agar masyarakat datang memilih dan tidak golput.<sup>10</sup>

Sosialisasi lain adalah pawai dan pembagian brosur. PPK Kecamatan Makassar juga melakukan pawai di jalan dan melakukan pembagian brosur. Di Kecamatan Makassar pawai dimulai dari Kantor Camat Makassar menuju Jalan Gunung Latimojong terus Jalan Sungai Limboto, Jalan Sungai Saddang, Jalan Veteran, Jalan Gunung Nona Baru dan berakhir di kantor camat. Pawai ini dilakukan selama satu hari.

#### *Sosialisasi Langsung*

Sosialisasi langsung merupakan sosialisasi yang diadakan di suatu tempat dan informasinya disampaikan langsung ke masyarakat tanpa menggunakan perantara. Sosialisasi langsung yang dilakukan KPU Kota Makassar dilakukan di beberapa titik seperti di pasar, kampus dan tempat umum

lainnya. Seperti yang diutarakan oleh informan bahwa:

*“Pelaksanaan pemilihan serentak yang dilakukan pada beberapa bulan yang telah lalu itu perlu sosialisasi yang baik oleh para pelaksana pemilihan umum dalam hal ini KPU, karena pemilihan itu merupakan pemilihan yang sangat rumit karena banyak sekali yang harus dipilih oleh para pemilih baik calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan juga presiden. Sehingga surat suara yang akan dicoblos sangatlah banyak yang harus diperhatikan dengan baik oleh para pemilih. Berdasarkan pengamatan saya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar di Kelurahan Manggala sangatlah kurang namun pergerakan sosialisasi KPU Kota Makassar di tempat-tempat umum di Kota Makassar banyak dilakukan seperti di kampus dan tempat umum lainnya.”<sup>11</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan didukung dengan data yang bersumber dari media sosial *facebook* KPU Kota Makassar yang mendokumentasikan proses sosialisasi di beberapa lokasi di Kota Makassar. Sosialisasi pemilihan umum 2019 diadakan di Kampus Stikes Mega Reski Makassar yang berlangsung pada tanggal 17 Desember 2018, Kampus STIM NITRO Makassar pada tanggal 30 November 2018, Kampus Universitas Islam Makassar pada tanggal 29 November 2018, dan KPU Kota Makassar

<sup>10</sup>Fadli, Warga Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar, wawancara, 15 Oktober 2019.

<sup>11</sup>Lalu Bikare, Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, wawancara, 18 Oktober 2019.

mengadakan *Goes To UNHAS* pada tanggal 20 Februari 2019. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Makassar ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa poin penting yaitu urgensi pemilu berintegritas, bagaimana menjadi pemilih cerdas, pentingnya peran pemuda untuk terlibat dalam kontestasi pemilu. Sosialisasi ini juga bermanfaat memberikan bimbingan mengenai metode atau cara yang dilakukan dalam pemilihan khususnya bagi para pemilih pemula yang ada di kampus-kampus. Para tim sosialisasi KPU Kota Makassar juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih disabilitas di Baruga Karaeng Patingalloang pada tanggal 27 Januari 2019. Sosialisasi yang sama juga dilakuka di Pasar Terong pada tanggal 9 Februari 2019.

### 1. Sosialisasi Berbasis Komunitas

Sosialisasi politik menjelang pemilihan presiden yang dilakukan dengan berbasis komunitas juga termasuk pada komunitas kaum marjinal. Masyarakat marjinal sama halnya dengan masyarakat miskin, masyarakat pinggiran yang nantinya tidak tertinggal dan tidak terisolasi dengan informasi tentang proses politik. Kaum marjinal dibedakan atas dua kelompok yang jarang mendapat perhatian dalam hal pendidikan. *Pertama*, penyandang cacat yaitu yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang memadai dan pendidikannya dibedakan dengan kaum normal yang menjadikan kaum cacat menjadi terasing dari lingkungan sosial, tereklusi dari sistem sosial orang-orang normal.

*Kedua*, anak-anak jalanan, kaum miskin yang sudah terbiasa dengan kekerasan.<sup>12</sup>

Sosialisasi politik oleh Relawan Demokrasi (Relasi) dilakukan secara gencar dengan memberikan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan presiden yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Sosialisasi politik yang diberikan kepada kaum marjinal juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam menyalurkan hak pilihnya. Saat pelaksanaan sosialisasi juga diketahui bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara pemilihan.

### 2. Berbasis Usia

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Makassar adalah sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula yang mayoritas adalah kalangan pelajar dengan tujuan para pemilih pemula ini menggunakan hak suaranya secara tepat dan berkualitas. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong agar para pemilih pemula antusias datang ke tempat pemungutan suara guna memilih partai politik atau calon pemimpin sesuai dengan aspirasinya. PPK dan PPS telah mendatangi beberapa sekolah swasta dan negeri di Makassar.<sup>13</sup> Sedangkan KPU Kota Makassar mendatangi SMAN 9 Makassar,

<sup>12</sup>Meri Sandora, "Konsep Pendidikan Anak Marginal dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2 (2019), h. 196-216.

<sup>13</sup>Siti Hadijah, Warga Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar, *wawancara*, 14 September 2019.

SMAN 14 Makassar dan SMAN 5 Makassar. Sosialisasi juga dilakukan oleh Relawan Demokrasi (Relasi) yang berjumlah 11 orang, yang direkrut untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga partisipasi politik di Sulawesi Selatan meningkat.

Berbagai upaya sosialisasi politik yang dilakukan menjelang pemilihan presiden bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selain sosialisasi politik juga dilakukan sistem pendataan pemilih yang akurat dan sistem data. Selain itu KPU juga melakukan sosialisasi tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apa yang dilakukan oleh KPU tersebut mendapat apresiasi masyarakat atas upaya perbaikan dan peningkatan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi politik tinggi karena pada pemilihan legislatif jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu banyak sekali. Jumlah TPS di Sulawesi Selatan banyak sekali karena maksimal satu TPS 300 orang, sementara pada pemilihan gubernur yang lalu bisa sampai 800. Mungkin karena jarak antara TPS dengan warga itu dekat, jadi mereka datang memberikan hak suara karena jarak domisilinya dengan TPS terbilang dekat.

Pada pemilihan gubernur, setiap TPS digunakan oleh 800 orang pemilih dan jaraknya jauh-jauh. Apalagi daerah-daerah yang jauh barangkali mereka malas datang karena dianggap jauh. Tapi karena TPS semakin dekat, jadi mereka datang

ikut berpartisipasi. Lewat program relawan demokrasi Relasi, program yang dilakukan di acara *car free day*, dan lewat komunitas sekolah dan kampus, komisioner KPU yang langsung datang dan memberikan sosialisasi ke komunitas itu.

KPU Kota Makassar terus menggalakkan sosialisasi partisipasi kepada pemilih milenial yang berjumlah 328 ribu berdasarkan DPT tahun 2019. Jumlah pemilih milenial diklasifikasikan usia 30 tahun ke bawah. KPU memastikan angka itu akan terus mengalami peningkatan. Sebenarnya jumlah pemilih milenial lebih besar dari ini bila kita merujuk pada klasifikasi generasi menurut David Stillman bahwa yang dimaksud generasi milenial atau gen Y adalah mereka yang lahir di tahun 1980.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilu, khususnya kalangan milenial dengan cara memaksimalkan rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu ini adalah sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan inspirasi masyarakat terkait urgensi pemilu dan demokrasi. Pada Rumah Pintar Pemilu, berbagai program pendidikan pemilih bisa dilakukan dan juga bisa menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu untuk sama-sama mengawal proses demokrasi.

3. *Sosialisasi Bentuk Bimbingan Teknis*  
Bentuk sosialisasi yang lain yaitu dengan bentuk bimbingan teknis (Bimtek). KPU Kota Makassar melalui PPK Kecamatan Makassar telah melakukan beberapa bimtek. KPU melakukan bimtek di

Kelurahan Maccini Parang sebanyak 2 kali. Bimtek juga dilaksanakan di Kantor Kelurahan Maccini Parang di Jalan Kesatuan. Walaupun bimtek ini tujuan utama adalah mensosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan tahapan Pilpres serta kesiapan apa saja yang harus dilakukan penyelenggara baik PPK, PPS dan KPPS dalam menghadapi pemilu. Tetapi di bimtek inilah selalu diingatkan agar anggota PPK, PPS dan KPPS harus memastikan dan mengajak keluarga, tetangga dan warga sekitarnya untuk datang memilih dan tidak golput.<sup>14</sup>

#### 4. Sosialisasi dengan Bentuk Numpang pada Acara yang Diselenggarakan oleh Instansi Formal Maupun Non Formal

PPK Kecamatan Makassar sangat pintar dalam hal mensosialisasikan pemilu, hal ini dapat dilihat dengan kebijakan PKK Kecamatan Makassar untuk memanfaatkan peluang pada acara yang terdapat massa yang banyak. PKK Kecamatan Makassar telah mensosialisasikan pemilu pada acara yang dilakukan oleh Majelis Ta'lim, acara organisasi seperti acara yang dilakukan oleh BKPRMI, acara yang dilakukan oleh LPM dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### 5. Sosialisasi Berupa Himbauan

Himbau untuk datang memilih dibacakan dengan menggunakan *sound system* masjid dan setelah itu himbauan tersebut

ditempel pada papan informasi masjid. Bentuk ini adalah yang sangat rutin dilakukan oleh KPPS dan PPS Kelurahan Maccini Parang untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk datang memilih.<sup>16</sup>

#### **Kendala KPU Kota Makassar dalam Melakukan Sosialisasi Politik**

Tanggungjawab KPU secara yuridis formal adalah menyelenggarakan pemilu, akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggungjawab moral yang lebih besar, tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demo-kritis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kunci utama keberhasilan pemilu terletak di tangan KPU, akan tetapi KPU perlu didukung oleh sumber daya, dana dan *stakeholder* yang ada seperti partai politik, birokrasi dan masyarakat.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa KPU pada pemilihan presiden 2019 kurang maksimal mengenai penanganannya karena informan mengatakan bahwa yang dilihat di lapangan adalah tim kerja KPU ada yang berpihak pada kandidat tertentu. Informan tersebut memberikan keterangan tambahan bahwa:

<sup>14</sup>Sumarwan, Warga Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar, wawancara, 15 Oktober 2019.

<sup>15</sup>Aminullah Sirajuddin, Warga Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar, wawancara, 14 Oktober 2019.

<sup>16</sup>Fadli, Warga Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar, wawancara, 15 Oktober 2019.

<sup>17</sup>FL, Warga Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar, wawancara, 2 September 2019.

*“Dalam penanganan pemilihan juga masih ada yang menggunakan rasa persaudaraan di mana saat pemilu 2019, masyarakat kewalahan pada saat pemilu 2019 dan tak heran jika ada orang tertentu yang didahulukan ataupun tidak semua pengurus KPU seperti itu, karena itu saya berpendapat bahwa KPU masih kurang maksimal dalam sosialisasi dan masih kurang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.”<sup>18</sup>*

KPU, PPK, PPS dan KPPS Kota Makassar sangat masif dalam mensosialisasikan pemilu khususnya sosialisasi secara tidak langsung. Hal ini dapat dilihat pada akun instagram KPU Kota Makassar yang banyak memposting kegiatan-kegiatan selama pra pemilu, pemilu dan pasca pemilu. Sejauh ini KPU memiliki banyak kegiatan, cara atau bentuk mensosialisasikan pemilu yang unik dan kreatif.

Kendala lain yang dihadapi oleh KPU dalam melakukan sosialisasi adalah kurangnya minat masyarakat untuk datang menghadiri sosialisasi yang terlihat dari jumlah masyarakat yang hadir pada saat sosialisasi politik dilakukan sehingga materi tentang proses pemilihan tidak tersampaikan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang komisioner KPU yang mengatakan bahwa:

*“Salah satu yang menjadi kendala bagi kami dalam melakukan sosialisasi adalah kurangnya anggota masyarakat yang*

*menghadiri ketika sosialisasi dilaksanakan dengan bermacam-macam alasan yang sifatnya pribadi, karena itu tujuan dan sasaran-sasaran yang diinginkan tidak tercapai.”<sup>19</sup>*

Hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi bukan hanya berasal dari internal KPU tapi juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak merespon dengan positif kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang proses politik dan tata cara pemilihan kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Peran KPU dalam sosialisasi politik pada pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Makassar yaitu dengan melakukan sosialisasi politik baik sosialisasi politik secara tidak langsung maupun sosialisasi politik secara langsung. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui perantara media seperti media sosial, media *online*, televisi, surat kabar, pamflet dan baliho yang dipasang di pinggir jalan raya. Sosialisasi politik secara langsung dilakukan di tempat oleh anggota KPU dan Tim Relasi yang dibentuk dengan mendatangi kampus, tempat-tempat keramaian seperti lapangan olahraga, dan komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat.

Kendala yang dihadapi KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik pada pemilihan

<sup>18</sup>RN, Warga Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar. *Wawancara*, 7 September 2019.

<sup>19</sup>SR, Komisioner KPU Kota Makassar, *wawancara*, 16 Agustus 2019.

presiden tahun 2019 di Kota Makassar adalah masih adanya anggota KPU yang berpihak pada kandidat tertentu dan kurangnya minat masyarakat untuk datang menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Sahid Gatara & Moh Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Meri Sandora, "Konsep Pendidikan Anak Marginal dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2 (2019), h. 196-216.
- Michael Rush & Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Wawancara**
- Aminullah Sirajuddin, Warga Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar, *wawancara*, 14 Oktober 2019.
- Fadli, Warga Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar, *wawancara*, 15 Oktober 2019.
- FL, Warga Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar, *wawancara*, 2 September 2019.
- JM, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar, *wawancara*, 18 Oktober 2019.
- Lalu Bikare, Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, *wawancara*, 18 Oktober 2019.
- MA, Warga Perumahan Bukit Graha Praja, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, *wawancara*, 18 Juli 2019.
- RN, Warga Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar. *Wawancara*, 7 September 2019.
- Siti Hadijah, Warga Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar, *wawancara*, 14 September 2019.
- SR, Komisioner KPU Kota Makassar, *wawancara*, 16 Agustus 2019.
- Sumarwan, Warga Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar, *wawancara*, 15 Oktober 2019.
- WD, Wiraswasta, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, *wawancara*, 18 Juli 2019.